



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DIREKTORAT ADVOKASI  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**

**JAKARTA,    JANUARI 2024**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Advokasi merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi di bawah Deputi Bidang Pencegahan BNN yang melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan. Tugas pokok melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui meningkatnya komitmen dari masyarakat, baik secara individu maupun kelompok / organisasi, melalui petugas pencegahan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari lingkup RT / RW ataupun Kelurahan / Desa.

Dari sisi kinerja, secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2023, Direktorat Advokasi telah melaksanakan kegiatan dan mencapai seluruh target output Indeks ketahanan keluarga terhadap resiko penyalahguna narkoba dari target 78,69. Direktorat Advokasi memiliki sasaran program meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba telah terbukti berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan pengasuhan orangtua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak.

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di 34 provinsi dan 173 kab/kota dengan skor Indeks Ketahanan Keluarga sebesar **85.39** (skala 100) atau **3.26** (skala 4 ) dan berada dalam kategori tinggi. Sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN 2020 s.d. 2024 Direktorat Advokasi mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, dengan sasaran kegiatan berfokus pada meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami oanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 ini, yang capaiannya diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang bersinar (Bersih Narkoba).

Dengan terbitnya laporan ini, berarti Direktur advokasi telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

LKIP Direktorat Advokasi 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja, dimana TA 2023 ini berhasil dicapai kinerja naik sebesar **9,6%** yaitu menjadi **88,31%** dari target **78,69%** output indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba yang telah ditetapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP Direktorat Advokasi 2023 ini dapat memicu dan memacu kinerja BNN khususnya Bidang Pencegahan, mencapai tingkat indeks ketahanan masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan memberikan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Atas semua prestasi ini kami mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

**Tim Penyusun LKIP**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I    PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Dasar Hukum.....	6
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
D. Struktur Organisasi.....	8
E. Sistematika.....	8
BAB II   PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	9
BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT ADVOKASI .....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja .....	13
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	13
BAB IV  PENUTUP.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu pun Desa atau Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyatakan bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Maka, diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan narkoba. BNN akan menjadikan program ketahanan keluarga sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba melalui penguatan sumber daya desa sehingga memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bidang Pencegahan BNN melaksanakan Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di tahun 2019 bekerjasama dengan UNODC menghasilkan model program penguatan institusi keluarga untuk menunjang pendidikan anti narkoba bagi keluarga. Program ini berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan parenting orangtua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif anak. Program ini merupakan hasil rekomendasi dari Pemetaan Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba yang dilakukan oleh bidang pencegahan di tahun 2018. Dari hasil rekomendasi pemetaan tersebut disebutkan bahwa faktor keluarga merupakan faktor penting dalam menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

Program yang berfokus pada Penguatan Ketahanan Keluarga ini dilanjutkan pada tahun 2020-2024 dengan pengembangan pada wilayah Desa sebagai bentuk implementasi adanya Desa Bersinar dengan Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa. Kegiatan ini merupakan modifikasi antara program Desa Bersinar dan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Untuk itu, perlunya sinergitas dan dukungan serta komitmen dari Stakeholders (Instansi Pemerintah, Institusi Swasta, Lembaga Pendidikan, Ormas/ Pokmas) yang perannya strategis dan sangat penting dalam mewujudkan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Kebijakan yang di susun oleh Direktorat Advokasi dalam pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di seluruh instansi vertikal BNN, baik itu di BNN

Provinsi maupun BNNKab/Kota dilakukan dengan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai panduan pelaksanaan kegiatan oleh BNNP/BNNKab/Kota.

Adapun strategis untuk meningkatkan indeks ketahanan keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilihat dari tercapainya daya tangkal keluarga dengan indeks kategori predikat “tinggi”. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga yang berada ditengah masyarakat sudah memiliki kemampuan mengendalikan diri, menghindari diri, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika. Konsepsi strategis yang dapat dikembangkan adalah melalui penanganan permasalahan narkoba yang bersifat lintas sektor dengan bekerjasama antar Kementerian/Lembaga/Daerah dan menjadikan mereka fasilitator melalui kerangka program ketahanan keluarga anti narkoba.

Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba ini sebagai upaya untuk mendorong dan memastikan seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah berkontribusi nyata melalui kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang diorientasikan pada upaya pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi pecandu narkoba maupun penegakkan hukum kejahatan narkoba. Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di tahun 2023 dengan nilai Indeks 8 (Kategori Tinggi) dengan target angka 85,39 (Kategori Tinggi). Program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba ini di lakukan di 173 Kabupaten Kota dengan jumlah peserta yang mendapatkan intervensi sebanyak 11.760 orang.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Deputi Bidang Pencegahan BNN sebagai satuan kerja dari lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan BNN, khususnya Direktorat Advokasi. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Direktorat Advokasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputusan Bidang Pencegahan. Direktorat Advokasi memiliki empat tim di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M.

### **2. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Direktorat Advokasi adalah menyelenggarakan fungsi advokasi P4GN di bidang pencegahan.

### **3. Fungsi**

Direktorat Advokasi memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diukur melalui indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba.

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Direktorat Advokasi dalam Struktur Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.

#### **E. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pencegahan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pencegahan BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

#### **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023**

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Direktorat Advokasi TA 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja****Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional****Deputi Bidang : Pencegahan****Direktorat : Advokasi****Tahun Anggaran : 2023**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	<b>85,39</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DIREKTORAT ADVOKASI**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Perjanjian Kinerja Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN tahun 2023 menetapkan 1 (satu) sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yaitu “Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” untuk merealisasikan target tersebut Direktorat Advokasi bekerja secara vertikal dengan satker BNNP dan BNNKab/Kota dan memiliki target indikator kegiatan yang sama yaitu Indeks Ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba dengan melakukan beberapa tahapan bisnis proses dalam pelaksanaan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Program Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa sebagai berikut:

**A. Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba**

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan
- 2) Melakukan pemetaan permasalahan penyalahgunaan narkoba untuk menentukan lokasi kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba.
- 3) Menentukan peserta atau keluarga yang menjadi sasaran dalam kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah sesuai tempat pelaksanaan.
- 4) Membentuk fasilitator serta menentukan narasumber intervensi kegiatan keterampilan hidup keluarga anti narkoba
- 5) Membentuk tim pelaksana (panitia) kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba
- 6) Memberikan penguatan dan pembekalan untuk fasilitator/ narasumber profesional dan tim pelaksana program ketahanan keluarga anti narkoba
- 7) Melakukan penetapan rencana kebutuhan kegiatan (*timeline* kegiatan, tempat, media, administrasi, konsumsi, dll)
- 8) Melaksanakan kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba

**B. Program Penguatan Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa**

**Tahapan Pembentukan Desa Bersinar**



Dalam tahun anggaran 2023 realisasi capaian kinerja Direktorat Advokasi sebagai berikut:

**Tabel**  
**Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Output Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78,69	85,39	92,15%

Berkaitan dengan program kegiatan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Advokasi dengan sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika dengan output kinerja indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkotika Pengukuran Indeks Ketahanan keluarga akan menggambarkan penguatan pada Sistem Keyakinan, Proses Organisasi dan Proses Komunikasi diantara keluarga. Dengan melakukan intervensi secara efektif, diharapkan program intervensi yang dilakukan akan berdampak terhadap penguatan keterampilan parenting, penguatan perilaku positif anak, serta resiliensi. Realisasi sebesar 85,39 dengan target 78.69, berarti ada kenaikan dari target yang ditentukan. Dari skala tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh Indeks Ketahanan Keluarga anti narkotika berada dalam kategori Tinggi secara nasional dan per Provinsi. Program Ketahanan Keluarga yang telah dilakukan oleh vertikal BNN Propinsi, Kabupaten dan Kota bersinergi dengan *stakeholder* terkait.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Direktorat Advokasi telah melaksanakan evaluasi kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui ketercapaian sasaran program ketahanan keluarga anti narkotika. Mendapatkan hasil evaluasi kinerja tersebut maka sudah dipersiapkan melalui aplikasi Dektara dengan memakai metode 5M dalam aplikasi tersebut:

1. *Man* : (SDM) dengan adanya Fasilitator (Penyuluh BNNP/BNNK), *Stakeholder* terkait, Pembina Fungsi dalam hal ini Direktorat Advokasi.
2. *Material* : telah mempersiapkan alat serta data dukung seperti modul dan perlengkapan pada saat kegiatan intervensi ketahanan keluarga berlangsung
3. *Metode* : selalu ada pemantauan dalam aplikasi Dektara tersebut.9
4. *Money* : anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
5. *Machine* : dengan aplikasi dektara

Dengan metode 5M tersebut tercapailai hasil evaluasi untuk mencapai kinerja Indeks Ketahanan Keluarga.

Nilai Indeks yang dicapai oleh masing-masing satuan kerja menggambarkan kondisi keluarga yang di berikan intervensi. Nilai indeks ketahanan keluarga yang rendah menunjukkan perlunya program pencegahan dilakukan lebih komprehensif kepada keluarga yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan. Nilai indeks ketahanan keluarga yang tinggi menunjukkan intervensi dapat menyasar keluarga lain yang ada di lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Target Capaian Anggaran Direktorat Advokasi secara Nasional sebesar Rp 24.250.269.365 sebesar 74.85% selengkapnya digambarkan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Realisasi Capaian Kinerja Anggaran**  
**Direktorat Advokasi Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahguna	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	32.398.535.000	24.250.269.365	74,85 %

an dan peredaran gelap narkotika				
---	--	--	--	--

Adapun analisis dari sisa anggaran Program sebesar Rp 8.148.265.635 atau sebesar 25,15% disebabkan adanya optimalisasi anggaran.

Sementara penggunaan anggaran sebesar 74,85% dianalisis sebagai upaya optimalisasi kegiatan yang telah ditargetkan pada tahun 2023.

**Tabel 4.**  
**Realisasi Capaian Kinerja, Capaian Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>IKU</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN</b>
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78.69	85.39	92,15%	<b>Bentuk Program :</b> Intervensi ketahanan keluarga anti narkoba  <b>Meliputi :</b> Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	32.398.535.000	24.250.269.365	74,85 %

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Direktorat Advokasi merupakan Unit Eselon II dibawah Kedeputian Bidang Pencegahan. Direktorat Advokasi memiliki dua unit koordinator dan empat unit subkoordinator. Di wilayah BNNP dan BNNKab/Kota dilaksanakan oleh bidang P2M dan bagian Pencegahan.

Dalam pencapaian kinerja Direktorat Advokasi Tahun Anggaran 2023 berjalan pada arah yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja Direktorat Advokasi antara lain:

- a. Sinergi lintas sektor dari Kementerian dan Lembaga serta para stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya melalui dukungan program intervensi berbasis lingkungan keluarga.
- b. Terbangunnya kesadaran di desa/kelurahan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana desa.
- c. Peran aktif para penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan resikonya.
- d. Standar pengukuran yang telah lebih jelas dan mudah dipahami terkait Indikator Kegiatan sehingga dapat digunakan satker vertikal dalam pengukuran kinerja mereka masing-masing
- e. Standar aktifitas dengan penjelasan yang detail mengenai masing-masing jenis kegiatan sebagai pedoman satker vertikal dan pusat dalam bekerja
- f. Surat Edaran terkait hal-hal teknis yang selalu diberikan sebagai petunjuk lebih lanjut bagi satker vertikal untuk bekerja lebih terarah
- g. Monitoring dan evaluasi yang terarah oleh satker pusat sebagai pembina fungsi satker vertical
- h. Bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan secara optimal sehingga menyamakan gerak dan langkah satker pusat-daerah.

- i. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk apa yang kami sebut sebagai sebuah kinerja dan menjadikan kinerja sebagai sebuah budaya, dalam konteks ini budaya pelayanan informasi bagi masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- j. Secara umum, keberhasilan pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga anti narkoba sangat dipengaruhi oleh materi intervensi ketahanan keluarga yang di sampaikan serta para pendukung program (panitia, narasumber, fasilitator, keluarga maupun pihak desa/kelurahan) yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga sehingga didapatkan nilai ketahanan keluarga anti narkoba.

## **B. SARAN**

Menyadari sepenuhnya masih banyak hal yang perlu kita lakukan supaya lebih optimal dalam pelaksanaan kerja yang berkinerja, maka kedepan perlu untuk lebih meningkatkan supervisi, pendampingan satker vertikal dalam pelaksanaan program terutama Advokasi. Selain itu perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Monitoring dan evaluasi perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan secara realtime sejak dari penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat lebih terpantau permasalahan yang muncul dilapangan untuk kemudian dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang pada akhirnya akan memperlancar pekerjaan dalam pencapaian kinerja yang telah ditargetkan.

Jakarta, Januari 2024

**Direktur Advokasi**

**Drs. Jafriedi ,M.M**

